

KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN RE-PIVOT TO ASIA DI KAWASAN ASIA- PASIFIK PERIODE 2021-2022

Agus Nilmada Azmi¹, Muhammad Meiza Fachri²

FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta^{1,2}

Abstract

This article discusses the United States' decision to take a pivot-to-Asia policy in the Asia-Pacific region during the Joe Biden Administration (2021-2022). In contrast to Trump, who is more "withdrawing" from intervening in the Asia-Pacific region and taking action/taking policies unilaterally with reference to 'America First'. Biden comes with a policy that is refocused, active and multilateral in securing US interests in the region. Using qualitative methods with literature study. This study aims to find out why the pivot-to-Asia policy was taken by Biden in dealing with China, compared to policies with Trump-like characteristics. From the research conducted, it was found that the reason why Biden took this policy was because the ruling decision makers (Democrats) were more inclined to a multilateral approach compared to Trump and the Republicans which were bilateral and unilateral. Thus, the common thread of the decision making is the decision makers holding executive and legislative power in the United States who influence party ideology and thinking in determining rational policies.

Keywords: Foreign Policy; Decision-Making Model; Pivot-to-Asia; Asia-Pacific; United States of America

Abstrak

Artikel ini membahas tentang Keputusan Amerika Serikat yang mengambil kebijakan *pivot-to-Asia* di kawasan Asia-Pasifik pada masa Pemerintahan Joe Biden (tahun 2021-2022). Berbeda dengan Trump yang lebih "menarik diri" dari berintervensi di kawasan Asia-Pasifik dan melakukan tindakan/mengambil kebijakan secara unilateral dengan mengacu kepada 'America First'. Biden hadir dengan kebijakan yang kembali berfokus, aktif dan bersifat multilateral dalam mengedepankan kepentingan AS di kawasan tersebut. Menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kebijakan *pivot-to-Asia* diambil oleh Biden dalam menghadapi China, dibandingkan kebijakan dengan sifat seperti Trump. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan, bahwa alasan mengapa Biden mengambil kebijakan tersebut adalah karena *decision-makers* yang berkuasa (Partai Demokrat) lebih condong ke pendekatan yang multilateral dibandingkan Trump dan Partai Republik yang bilateral dan unilateral. Sehingga, benang merah dari pengambilan keputusan tersebut adalah para *decision-makers* pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif Amerika Serikat yang dipengaruhi ideologi dan pemikiran partai dalam menentukan kebijakan yang rasional.

Kata kunci: Kebijakan Luar Negeri; Model Pengambilan Keputusan; Pivot-to-Asia; Asia-Pasifik; Amerika Serikat

Copyright (c) 2024 Agus Nilmada Azmi¹, Muhammad Meiza Fachri².

✉ Corresponding author : Agus Nilmada Azmi

Email Address : agus.nilmada.azmi@uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Artikel ini menganalisis tentang keputusan Amerika Serikat (AS) dalam mengambil kebijakan *Re-Pivot to Asia* pada periode 2021-2022 di wilayah Asia-Pasifik, setelah sebelumnya sempat menarik diri dari kawasan tersebut. Fokus kembali ke Asia ini kembali terjadi pasca naiknya Joe Biden sebagai Presiden AS pada Pemilihan Umum AS di akhir tahun 2020 lalu. AS di masa pemerintahan Biden hadir lebih aktif dalam melakukan berbagai kerja sama di kawasan Asia-Pasifik untuk menjamin kepentingan AS di kawasan. (The White House, 2022; Rachel Vandenbrink, 2022).

Orientasi kebijakan politik luar negeri AS selama ratusan tahun memiliki dua sifat dalam kegiatan-kegiatan internasional, yakni isolasionis dan internasionalis. Kebijakan luar negeri yang bersifat isolasionis berarti kebijakan luar negeri negara tersebut secara sengaja (*voluntarily*) tidak banyak melakukan intervensi terhadap negara lain. Pemerintah yang berprinsip isolasionis dalam politik luar negerinya akan kurang aktif dalam arena multilateral dan membatasi dirinya dalam beraktivitas di perpolitikan internasional dan bertindak lebih *unilateral*. Sementara sifat internasionalis pada kebijakan luar negeri berarti pemerintah negara akan aktif dalam kegiatan-kegiatan multilateral, seperti berpartisipasi dalam kerja sama antar negara di berbagai level, baik politik, ekonomi dan budaya, serta melakukan intervensi terhadap aktivitas negara lain. (Hogervorst, 2018)

Naiknya Presiden Obama mereorientasikan kembali arah politik luar negeri AS untuk menjadi lebih aktif di kawasan Asia-Pasifik. (Lieberthal, 2011) Orientasi ini dilakukan untuk menjawab ancaman baru dari China. (Lieberthal, 2011) Perubahan orientasi ini bertujuan untuk melakukan perimbangan kekuasaan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh musuh AS (China) dan mempertahankan pengaruh AS di kawasan Asia-Pasifik. Strategi ini dikenal sebagai Pivot to Asia. Strategi Pivot to Asia Obama diwujudkan melalui pendirian Trans-Pacific Partnership (TPP) dan penguatan kerja sama militer dengan sekutu AS di Asia-Pasifik. (Rich, 2018; Saha, 2020) Naiknya Trump pada awal 2017 memberikan perubahan besar pada lanskap kebijakan politik luar negeri AS dengan kebijakan American First. (Wardhana&Dugis,2019) Kebijakan ini mengarahkan politik AS untuk bersifat isolasionis (non-intervensi) dengan tidak banyak ikut campur dalam perpolitikan internasional. (Saha, 2020) Trump menarik AS dari Trans-Pacific Partnership dan mengurangi perhatian pada kawasan Asia-Pasifik. Implikasinya adalah kerja sama antara AS dan negara-negara kawasan Asia-Pasifik menjadi terbatas dan membuka akses bagi hegemoni China di kawasan pada masa pemerintahan Trump. (Saha, 2020) Menangnya Joe Biden dalam Pemilihan Umum AS pada 2020 lalu mengembalikan sifat kebijakan luar negeri AS ke arah internasionalis. Pengembalian sifat kebijakan luar negeri AS ini tergambarkan dalam statemen kemenangan Biden dalam pemilu AS, "*America is back, ready to lead the world not retreat from it*". (Fang dkk., 2020) Presiden Biden juga mengkritik 'American First' Trump sebagai "*American Alone*" dan akan mengembalikan kebijakan yang mengembalikan fokus AS ke kerja sama multilateral dan penguatan aliansi. (Fang dkk., 2020; Miri & Omrani, 2022) Dengan demikian, tergambar jelas fokus kebijakan luar negeri pada masa Presiden Biden (yang berasal dari Partai

Demokrat, seperti pendahulunya, Obama) adalah kembali pada strategi kebijakan (*re*)-*pivot to Asia*.

Arah kebijakan luar negeri AS terlihat dari beragam kebijakan tahun pertama dan kedua pemerintahan Biden pada periode 2021-2022. Biden mengesahkan beragam kebijakan strategis di kawasan Asia-Pasifik, seperti pembentukan aliansi Australia, Inggris dan AS (AUKUS), revitalisasi Quad, program Build Back Better World (B3W), dan pembentukan Indo-Pacific Economic Framework. Kebijakan-Kebijakan AS ini, merupakan implementasi dari Strategi Hindia-Pasifik AS yang dirumuskan oleh Biden dengan tujuan untuk “bersama-sama menciptakan kawasan Hindia-Pasifik yang terbuka, terhubung, aman dan makmur melalui kerja sama”. (Hansen, 2022; The White House, 2021, 2022a)

Strategi kembali ke Asia ini juga merupakan aksi balasan dari AS untuk menghadapi peningkatan kekuatan China di Asia-Pasifik, setelah sebelumnya diabaikan pada masa Presiden Trump yang berfokus pada konsolidasi internal dan urusan domestik. (Clarke, 2019; Kuo, 2022) Diketahui, China mengalami peningkatan kekuatan dan pengaruh yang signifikan di kawasan Asia-Pasifik dengan program Belt and Road Initiative dan peningkatan kekuatan militer. Baik Trump atau Biden memiliki permasalahan yang sama dengan perkembangan hegemoni China di kawasan, tetapi langkah kedua presiden tersebut memiliki perbedaan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. John W. Creswell & J. David Creswell (2018) mengemukakan, bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan sosial manusia, baik individu, maupun kelompok. Fokus dari artikel ini adalah keputusan pengambilan kebijakan (*pivot to Asia*) oleh negara Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden.

Metode *library research* atau studi pustaka digunakan pada artikel ini, dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari riset-riset terdahulu, buku-buku yang terkait dengan permasalahan, jurnal-jurnal, dan media-media, baik bersifat fisik, maupun *online* yang dapat memberikan informasi aktual terkait perkembangan kasus. Artikel ini menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis. Pemilihan teknik ini adalah karena kesederhanaan bentuknya tanpa perlu melakukan penghitungan yang rumit, tetapi dapat tetap menjelaskan hasil secara sistematis agar mudah dipahami. (Sugiyono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi AS vs China di Kawasan Asia-Pasifik

Sebagai pemenang Perang Dunia ke-2 dan Perang Dingin, dominasi AS di kawasan Asia-Pasifik selama puluhan tahun tampak tidak tergoyahkan. Pondasi “hegemoni” pasca kedua perang tersebut dilihat dari banyaknya *partner* aliansi AS di kawasan Asia-Pasifik, yang berisikan Jepang, Korea Selatan, Australia, New Zealand, Taiwan dan negara-negara Asia-Pasifik lainnya. (Mishra, 2016). Selain memiliki negara-negara aliansi, dominasi AS juga didorong oleh keberadaan basis-basis militernya di kawasan yang telah berada semenjak Perang Dunia Ke-2 berakhir. Muncul kemudian strategi “*island chain*”

dengan memperkuat keberadaan basis-basis militer ini di kawasan saat Perang Dingin untuk melawan musuh-musuh AS.(Solidarity.net, 2023) Demikian kuatnya keberadaan militer AS di kawasan, yang bahkan menurut data dari Pentagon, per 2023, terdapat sekitar 750 basis militer AS yang tersebar di seluruh dunia, 313 di antaranya terdapat di kawasan Asia Timur, keberadaan US Indo-Pacific Command dengan 375 ribu personel sipil dan militer(Democracy.net, 2023).

Dominasi AS didorong juga oleh kemajuan dan kekuatan teknologi militer dan ekonomi, AS juga berpengaruh cukup besar di kawasan Asia-Pasifik kendati jaraknya yang jauh dari kawasan tersebut. Pada bidang militer, misalnya, produk-produk militer buatan AS menjadi produk utama yang dibeli oleh negara-negara di Asia-Pasifik untuk mempertahankan negaranya.

Menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), dari kurun waktu 2018-2022, 73% total ekspor produk militer AS adalah ke Asia, dengan 31% ekspor ke Asia Timur. Diketahui, Jepang, Korea Selatan, dan Australia adalah negara pengimpor produk militer AS paling banyak, masing-masing mengimpor produk militer AS sebesar 97%, 71%, 73% dari total pembelian produk militer oleh negara.(Stocholm International Peace Research Institute Editor, 2023) Singkatnya, produk militer AS menjadi yang paling diminati dan dibeli di kawasan Asia-Pasifik, yang ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pembelian senjata asing terbesar pada kurun waktu 2018-2022

Rank	Importer	Share of global arms imports (%)		Per cent change from 2013-17 to 2018-22 ^a	Main suppliers and their share of importer's total imports (%), 2018-22					
		2018-22	2013-17		1st	2nd	3rd			
1	India	11	12	-11	Russia	45	France	29	USA	11
2	Saudi Arabia	9.6	10	-8.7	USA	78	France	6.4	Spain	4.9
3	Qatar	6.4	1.5	311	USA	42	France	29	Italy	14
4	Australia	4.7	3.6	23	USA	73	Spain	19	Switzerland	3.0
5	China	4.6	4.2	4.1	Russia	83	France	8.1	Ukraine	5.6
6	Egypt	4.5	4.5	-5.3	Russia	34	Italy	19	France	19
7	South Korea	3.7	2.2	61	USA	71	Germany	19	France	7.9
8	Pakistan	3.7	3.0	14	China	77	Sweden	5.1	Russia	3.6
9	Japan	3.5	1.2	171	USA	97	UK	1.9	Sweden	0.3
10	United States	2.7	2.0	31	UK	24	Netherlands	13	France	11
11	UAE	2.7	4.1	-38	USA	66	Türkiye	7.4	Russia	5.4
12	Kuwait	2.4	0.9	146	USA	78	Italy	10	France	9.0
13	United Kingdom	2.3	1.7	31	USA	81	South Korea	13	Israel	2.8
14	Ukraine	2.0	<0.05	8 631	USA	34	Poland	17	Germany	11
15	Norway	2.0	0.5	285	USA	86	South Korea	8.2	Italy	3.5
16	Israel	1.9	1.8	2.9	USA	79	Germany	20	Italy	0.2
17	Netherlands	1.9	0.4	307	USA	95	Germany	3.9	Finland	0.6
18	Algeria	1.8	4.1	-58	Russia	73	Germany	10	France	5.2
19	Türkiye	1.3	2.4	-49	Italy	35	Spain	20	Russia	19
20	Singapore	1.3	1.4	-14	France	52	USA	26	UK	7.6
21	Thailand	1.0	0.9	-1.1	South Korea	33	China	14	USA	10
22	Brazil	0.9	0.6	48	France	39	UK	14	Sweden	13
23	Philippines	0.9	0.5	64	South Korea	42	Israel	22	USA	15
24	Indonesia	0.9	2.7	-69	South Korea	32	USA	26	France	12
25	Bangladesh	0.9	1.6	-48	China	74	UK	5.8	Türkiye	4.5
26	Poland	0.9	0.5	64	USA	56	South Korea	17	Germany	6.5
27	Viet Nam	0.8	2.8	-72	Russia	55	Israel	16	Belarus	10
28	Italy	0.8	1.3	-41	USA	92	Israel	4.4	France	2.0
29	Morocco	0.8	1.1	-30	USA	76	France	15	China	6.8
30	Myanmar	0.8	0.8	-3.0	Russia	42	China	29	India	14
31	NATO ^b	0.7	<0.05	2 700	France	66	USA	18	UK	15
32	Afghanistan	0.7	0.8	-11	USA	96	Brazil	2.6	Belarus	1.4
33	Canada	0.7	1.1	-36	USA	32	Australia	27	Spain	15
34	Greece	0.7	0.9	-26	France	48	USA	29	UK	12
35	Kazakhstan	0.6	0.8	-22	Russia	94	China	2.6	South Africa	1.8
36	Belarus	0.6	0.3	55	Russia	100	China	0.1
37	Serbia	0.5	0.1	743	China	43	Russia	31	Belarus	20
38	Chile	0.5	0.3	56	UK	38	Australia	36	USA	10
39	Jordan	0.5	0.8	-39	USA	40	UAE	20	Russia	17
40	Bahrain	0.5	0.1	380	USA	83	UK	7.0	Italy	4.1

Sumber: Stocholm International Peace Research Institute (SIPRI)

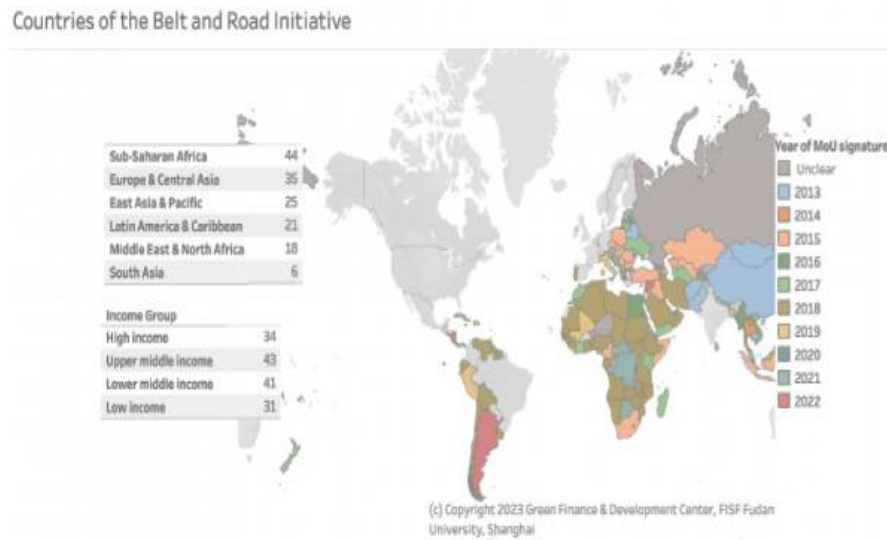
Tidak hanya pada bidang militer, pada bidang ekonomi AS hadir sebagai negara dengan *foreign direct investment* tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, dengan nilai hampir 900 miliar dollar. Tidak hanya itu, AS juga mencanangkan berbagai kerja sama yang saling menguntungkan di kawasan tersebut, salah satunya adalah Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang beranggotakan Australia, Brunei, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, serta rencana B3W untuk membantu membangun infrastruktur di negara-negara berkembang senilai 40 triliun dollar (\$40+ trillion). (The White House, 2022b; The White House, 2021) Dengan demikian, AS telah jelas masih memiliki “taring” yang kuat di kawasan Asia-Pasifik dan tampak akan tetap mempertahankan hegemoninya di kawasan Asia-Pasifik agar status tersebut tidak “direbut” oleh China.

Adapun negara yang “menantang” dominasi oleh AS hadir pasca Perang Dingin berakhir. Bubarnya musuh utama AS, Uni Soviet, ternyata memunculkan *rival* berupa China kepada dunia. Melalui reformasi pada berbagai dimensi domestik China, terutama dimensi ekonomi pada tahun 1978 melalui adopsi sistem pasar bebas terbuka dengan mengurangi kontrol negara terhadap faktor-faktor ekonomi dan mulai berinvestasi pada sektor produksi industri, serta edukasi masyarakat (utamanya pekerja/*workforce*). (Hu dkk., 1997) Ekonomi China berhasil bangkit dan menjadi salah satu negara terkuat di dunia yang kemudian turut menyokong dimensi lainnya, termasuk militer. Kebangkitan ini telah tergambarkan dan diprediksi oleh Pentagon sejak tahun 2006 di masa Bush yang menganggap, bahwa China adalah negara dengan potensi terbesar untuk dapat berkompetisi dengan AS. (Scott, 2018)

China mengalami peningkatan kekuatan dan pengaruh yang signifikan di kawasan Asia-Pasifik. Kerja sama China dengan negara-negara di Asia-Pasifik telah memberikan suatu keuntungan bagi China untuk mencapai hegemoni kawasan. Melalui Belt & Road Initiative (BRI) China membuka hubungan kerja sama strategis yang saling menguntungkan, serta memberi pinjaman uang kepada negara-negara di Asia-Pasifik untuk dapat melakukan pembangunan. (Lindley, 2022) Diketahui, per Maret 2022 telah lebih dari 144 negara menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) BRI seperti yang dapat dilihat pada **gambar. 1**.

Lebih lanjut, bagi negara-negara Asia-Pasifik kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan China lebih signifikan daripada dengan AS. Pada tahun 2020, nilai perdagangan China dengan negara-negara Asia Tenggara berjumlah 685 miliar dollar, dibandingkan AS yang mencapai 362 miliar dollar. (McCarthy, 2022) Kemudian, di bidang militer, China telah mampu membuat berbagai alat-alat militer strategis, seperti kapal selam dan pesawat tempur yang dibeli oleh negara-negara mitra dekat China (Center for Strategic and International Studies, 2018; Doğan, 2021) Dengan kekuatan yang ada saat ini, China tampak leluasa mengedepankan kepentingannya di kawasan. Salah satu yang menjadi problematika utama di kawasan adalah klaim *nine-dash line* di Laut China Selatan yang tidak sesuai dengan UNCLOS, klaim-klaim China terhadap pulau-pulau milik negara sekutu AS, seperti Kepulauan Senkaku milik Jepang, serta ancaman invasi terhadap Taiwan. (AlJazeera, 2023a; Liao, 2022) Bahkan, peristiwa “adu kapal perang” semacam *gunboat diplomacy* kerap kali terjadi antara kapal perang AS melawan kapal perang China di LCS. (AlJazeera, 2023b)

Gambar 1: Peta negara-negara di dunia yang telah menandatangani kerja sama BRI



Sumber: Greenfdc.org

Pendekatan Biden vs Trump dalam menghadapi China di Asia-Pasifik

Dengan kebangkitan dan tindakan agresifnya, China telah mengancam negara-negara Asia-Pasifik, termasuk negara sekutu AS, yang secara langsung juga mengancam kepentingan AS di kawasan. Asia-Pasifik sebagai salah satu kawasan dengan perputaran ekonomi tercepat di dunia dan pasar terbesar tentu menjadikannya “kepentingan nasional permanen” yang harus senantiasa dijaga oleh AS dari hegemoni China. Sebagai aktor rasional, tentu akan diambil suatu tindakan oleh AS agar kepentingan tersebut tetap aman dari China. Sehubungan dengan hal tersebut, telah terjadi dua pendekatan berbeda yang dijalankan oleh Pemerintah AS, yakni pendekatan yang dilakukan oleh Trump (2017-2020) dan Biden (2021-2022) dalam menjalankan kepentingan AS dalam “melawan” bangkitnya dominasi China di Kawasan Asia-Pasifik.

Trump dinilai menggunakan pendekatan yang bersifat *unilateral* dan “isolasionis” yang mengedepankan kepentingan nasional melalui ‘*America First*’ dalam menanggapi berbagai isu-isu internasional termasuk hegemoni China yang semakin berkembang. Dukungan terhadap asumsi ini dapat dilihat dari tindakan Trump yang menarik diri dari berbagai perjanjian multilateral seperti Paris Agreement, *nuclear deal Iran* dan Transpacific Partnership karena perjanjian-perjanjian ini dinilai merugikan AS (sejalan dengan *America First*). TPP yang digadang-gadang menjadi suatu pencapaian besar Obama dengan tujuan menciptakan jaringan perdagangan antara AS dengan 11 negara di kawasan Pasifik, hingga ke Asia Timur untuk membatasi pengaruh China, bukanlah alasan yang cukup untuk menahan Trump dari menarik diri. Penarikan ini dilakukan Trump untuk melindungi pekerja dan bisnis-bisnis AS dari berkompetisi dengan pekerja-pekerja dari negara dengan upah rendah. (Baker, 2017) Trump bertindak dengan perspektif *in-ward looking* dalam membalas ancaman dari China. Sebagai contoh adalah tindakan Trump dalam melakukan Perang Dagang dengan China dengan menaikkan tarif terhadap

produk-produk dari China karena dinilai merugikan AS. (Kapustina dkk., 2020) Namun, aksi-aksi *in-ward* ini tidak berarti Trump tinggal diam dalam menghadapi klaim dan tindakan *unilateral* China yang melanggar hukum internasional di arena luar, seperti LCS dan tindakan-tindakan mengancam lainnya di kawasan. Trump juga melakukan *balancing* dengan mendekati calon *hegemon* lainnya yang menjadi rival China, yaitu India. (Pranshu Verma, 2020) Selain itu, Trump juga tidak segan melakukan aksi *gunboat diplomacy* dengan mengirimkan dua armada kapal induk bersenjata lengkap ke LCS. (Andelman, 2020) Singkatnya, Trump memiliki kecenderungan untuk bersikap unilateral dalam memajukan kepentingan nasional.

Adapun pemerintahan Biden tampak lebih aktif, internasionalis dan “multilateralist” dalam menghadapi China di kawasan. AS menguatkan kembali hubungan dengan rekan-rekan, mitra dan negara aliansinya di kawasan. Pendekatan oleh AS ini dapat dilihat pada terjalinnya aliansi AUKUS, penguatan Quad dan terjalinnya penguatan hubungan bilateral dengan Korea Selatan. (Budryk, 2020) Biden juga memperkuat kemitraan dengan negara-negara sekutu, berencana menambah jumlah personil militer dan alutsista AS di kawasan Asia-Pasifik untuk meng-*counter* China. Berbeda dengan Trump yang lebih unilateralis, Biden mengedepankan multilateralisme melalui penguatan hubungan dengan negara-*partner* di kawasan dan mengambil kebijakan yang juga menguntungkan negara-negara kawasan (berbeda dengan Trump yang titik berat keuntungan hanya di AS) untuk membatasi pengaruh China yang juga menguntungkan bagi negara yang ingin bermitra. Dalam hal ini, Biden meng-*counter* kebijakan ekonomi China berupa BRI dan berbagai pinjaman dengan mencanangkan B3W dan IPEF. Serta, melawan kekuatan militer melalui penjualan senjata mutakhir kepada negara-negara aliansi dan mitra AS, pembentukan AUKUS dan revitalisasi QUAD. Sehingga, tindakan-tindakan yang dilakukan Biden kontras dengan yang dilakukan oleh Trump, yakni Biden lebih aktif dan melalui cara-cara bersama sekutu (*multilateral*).

Faktor Penyebab Pengambilan Kebijakan *Pivot-to-Asia*

Sebagai aktor rasional tentunya negara akan mengambil opsi paling menguntungkan bagi negaranya masing-masing. Adapun dalam fenomena perbedaan pendekatan dan kebijakan yang diambil antara Trump dan Biden di Asia-Pasifik dalam menghadapi China dalam suatu sudut pandang masih tetap rasional dan mengedepankan kepentingan nasional AS. Akan tetapi, yang membedakan adalah variabel-variabel lain di dalam pemerintahan suatu negara tersebut, yakni para *decision-makers* politik luar negeri yang berbeda pandangan.

Perlu diketahui, bahwasanya Trump adalah Presiden dari Partai Republik, sementara Obama (yang pertama kali mencanangkan *Pivot-to-Asia*) dan Joe Biden berasal dari Partai Demokrat. Perbedaan ini ternyata memainkan peran cukup krusial dalam pengambilan kebijakan luar negeri AS. Menurut survei dari *Chicago Council on Global Affairs*, para pemilih Republik lebih condong kepada kebijakan luar negeri yang mandiri, independen dan melakukan tindakan-tindakan langsung dalam memperjuangkan kepentingan nasional. (Jochheim & Lobo, 2023) Sementara, Partai Demokrat lebih condong terhadap kebijakan luar negeri yang multilateral (bersama-sama dengan sekutu dan aliansi) dalam menghadapi permasalahan kepentingan nasional. Hal ini

tentunya mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri untuk lebih condong pada partai yang berkuasa. Karena, porsi untuk *decision-making* kebijakan luar negeri AS dipegang oleh eksekutif (Presiden) dan legislatif (Kongres). (Masters, 2017) Maka, partai dan calon presiden yang menang pemilu memiliki kontrol yang besar terhadap keputusan luar negeri yang diambil. Dengan demikian, berkaca kepada Trump dan Biden, pendekatan yang sering dilakukan masing-masing pemerintahan tampak “mengekor” stigma tendensi partai yang berkuasa. Dengan Trump yang lebih *unilateral* dan Biden (dan Obama) yang *multilateral* tampak seperti perwujudan dari pemikiran/ideologi partai masing-masing.

KESIMPULAN

Dominasi AS di Asia-Pasifik telah berjalan selama puluhan tahun pasca Perang Dunia ke-Dua yang kemudian dilanjutkan dengan Perang Dingin. Pasca Perang Dingin, “residu-residu” kekuatan AS masih tetap ada dan kuat di kawasan Asia-Pasifik dengan keberadaan basis-basis militernya di kawasan. Bangkitnya China, terutama pada dekade kedua dan ketiga Abad ke-21, merupakan ancaman bagi kepentingan AS di kawasan. Untuk menghadapi ancaman dari China tersebut, diambillah kebijakan-kebijakan yang dianggap paling *rasional* bagi masing-masing pemerintah AS pada masa tersebut (2011-2022), yakni Obama (2009-2016), Trump (2017-2020) dan Biden (2021-2022). Diketahui, masing-masing pemimpin tersebut memiliki “corak” dan pendekatannya tersendiri dalam menghadapi hegemoni China di kawasan Asia-Pasifik.

Pemerintahan Obama adalah yang pertama kali memberi perhatian terhadap kawasan Asia-Pasifik dan menjadi pionir dari kebijakan *re-balancing-to-Asia/Pivot-to-Asia* untuk menghadapi bangkitnya China di kawasan. Namun, naiknya Trump tampak “membatalkan” perencanaan Obama untuk membatasi kepentingan China. Trump hadir dengan ‘*America First*’ dan menghadapi China melalui aksi-aksi yang bersifat *unilateral* dan tidak terlalu mencampuri urusan geopolitik kawasan. Menangnya Joe Biden mengembalikan pendekatan luar negeri yang menitikberatkan pada penguatan kerja sama dengan aliansi-aliansi AS di kawasan secara aktif dengan mengedepankan multilateralisme dalam mengambil tindakan, serta berpartisipasi aktif secara langsung (dengan melalui IPEF, B3W, AUKUS, dan QUAD). Kendati berbeda, kebijakan yang diambil tetap bersifat “paling rasional” bagi pihak-pihak yang berkuasa, karena *decision-makers* (partai berkuasa yang menjadi mayoritas di legislatif dan eksekutif) yang memiliki interpretasi dan ideologi masing-masing mengenai langkah paling tepat dan optimal dalam memajukan kepentingan nasional AS di kawasan Asia-Pasifik dalam menghadapi hegemoni China.

DAFTAR PUSTAKA

- Alex Mintz, & Karl DeRouen. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*.
- Jochheim, U., & Lobo, R. B. (2023). *Geopolitics in the Indo-Pacific: Major players' strategic perspectives*.
- John W. Creswell, & J. David Creswell. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edition). SAGE.

- Rich, W. C. (2018). Looking back on President Barack Obama's legacy: Hope and change. Dalam *Looking Back on President Barack Obama's Legacy: Hope and Change*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-01545-9>
- Rachel Vandenbrink. (2022, Mei 25). *Biden's Asia Trip Seeks to Revitalize Alliances, Focus on China*. United States Institute of Peace.
- Robinson, T. W. (1967). A National Interest Analysis of Sino-Soviet Relations. Dalam *Quarterly* (Vol. 11, Nomor 2). <https://www.jstor.org/stable/3013925>
- Saha, P. (2020). *From "Pivot to Asia" to Trump's ARIA: What Drives the US' Current Asia Policy?*
- Dompere, K. K. (2014). The problem of the social goal-objective formation in democratic societies of collective decision-choice systems. Dalam *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 4, hlm. 1-31). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-05173-4_1
- Kapustina, L., Lipková, L., Silin, Y., & Drevalev, A. (2020). US-China Trade War: Causes and Outcomes. *SHS Web of Conferences*, 73, 1012. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301012>
- Lindley, D. (2022, Agustus 1). *Assessing China's Motives: How the Belt and Road Initiative Threatens US Interests*. Journal of Indo-Pacific Affairs. Air University .
- Miri, S. M., & Omrani, A. (2022). The impact of Joe Biden's rise to power on the US transatlantic foreign policy. *Revista Cimexus*, 17(1), 219-238. <https://doi.org/10.33110/cimexus170110>
- Mishra, V. (2016). US power and influence in the Asia-Pacific region: The decline of 'alliance mutuality.' *Strategic Analysis*, 40(3), 159-172. <https://doi.org/10.1080/09700161.2016.1156251>
- Pranshu Verma. (2020, Oktober 3). *In Wake of Recent India-China Conflict, U.S. Sees Opportunity*.
- Scott, D. (2018). The Indo-Pacific in US Strategy: Responding to Power Shifts. Dalam *Rising Powers Quarterly* (Vol. 3, Nomor 2). <https://risingpowersproject.com/files/wp-content/uploads/2018/10/vol3.2-scott.pdf>
- Wardhana, A., & Dugis, V. (2019). Selective Isolationism Grand Strategy: United States Foreign Policy During Trump Administration Grand Strategy Isolasionisme Selektif: Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Era Trump. *Jurnal Global & Strategis*, 13(2), 141-156. <https://doi.org/DOI:10.20473/jgs.13.2.2019.141-156>
- Center for Strategic and International Studies. (2018). *How is China Modernizing its Navy?*
- Hansen, B. (2022). *Continuity and Change in Joe Biden's Indo-Pacific Strategy*. <https://www.sciencespo.fr/ceri/observatory-indo-pacific/wp-content/uploads/2022/07/Brynn-HANSEN-Indo-Pacific-Final-Paper.pdf>
- Hogervorst, K. (2018). *Isolationism in American Foreign Policy* [Student Theses, Utrecht University]. <https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/29063/BA-Thesis.pdf?sequence=2>

- Hu, Zuli., Khan, M. S., & International Monetary Fund. (1997). *Why is China growing so fast?* International Monetary Fund. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues8/issue8.pdf>
- Stocholm International Peace Research Institute Editor. (2023). *TRENDS IN INTERNATIONAL ARMS TRANSFERS, 2022*.
- The White House. (2021, Juni 12). *FACT SHEET: President Biden and G7 Leaders Launch Build Back Better World (B3W) Partnership*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/12/fact-sheet-president-biden-and-g7-leaders-launch-build-back-better-world-b3w-partnership/>.
- The White House. (2022a). *Indo-Pacific Strategy of the United States*.
- The White House. (2022b, Maret 23). *FACT SHEET: In Asia, President Biden and a Dozen Indo-Pacific Partners Launch the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity*.
- Alex Mintz, & Karl DeRouen. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*.
- AlJazeera. (2023a, Januari 11). *China renews threat, warns Taiwan independence will be 'punished.'* AlJazeera News.
- AlJazeera. (2023b, Maret 23). *Chinese military says US ship 'warned' away in South China Sea*. AlJazeera News.
- Andelman, D. A. (2020, Juli 7). *Trump's risky nose-to-nose challenge to China in the South China Sea*. CNN.
- Baker, P. (2017, Januari 23). *Trump Abandons Trans-Pacific Partnership, Obama's Signature Trade Deal*. The New York Times.
- Budryk, Z. (2020, September 17). *Republicans, Democrats split on foreign policy priorities: poll*. The Hill.
- Clarke, M. (2019, Mei 28). *China's power over Asia-Pacific rising partly due to Donald Trump, Lowy's Asia Power Index says*.
- Democracy.net. (2023, Februari 14). *The U.S. Has 750 Overseas Military Bases, and Continues to Build More to Encircle China*. Democracynow.
- Fang, A., Zhou, M., & Regalado, F. (2020, Desember 2). *Team Biden says America is back. But is Asia ready to welcome it?* Nikkei Asia.
- Kuo, M. A. (2022, Juni 27). *The Biden Administration's China Strategy*. The Diplomat. Kuo, Mercy A.
- Liao, O. (2022, Juli 8). *Long-Simmering Tensions Flare Over Disputed Senkaku Islands in East China Sea*. VOA News.
- Lieberthal, K. G. (2011, Desember 21). *The American Pivot to Asia*. Brookings .
- Masters, J. (2017, Maret 2). *U.S. Foreign Policy Powers: Congress and the President*. Council on Foreign Relations.
- McCarthy, J. (2022, Januari 20). *With U.S. focused on defense, China's trade and infrastructure sweep Southeast Asia*. npr.
- Slantchev, B. L. (2005). *Introduction to International Relations Lecture 3: The Rational Actor Model*. Department of Political Science, University of California. <http://slantchev.ucsd.edu/courses/ps12/03-rational-decision-making.pdf>
- Solidarity.net. (2023, Januari 19). *US bases positioned for war against China*. Solidarity.net.